PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 34 TAHUN 2024

RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2025

NOMOR : 24/RENJA-BPKD/2024

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksnaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 85);

14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2025

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Wali Kota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas, Badan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.

9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah Dokumen Perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Musyawarah Rencana Pembangunan, Anggaran Pendapatan Belanja Kota.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

(2) Renja PD Tahun 2025 memuat Program dan Kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.

(3) Renja PD Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

(4) Renja PD Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I : Pendahuluan

b. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

c. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

e. Bab V : Penutup

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Nomor Renja PD Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Agustus 2024 M
11 Safar 1446 H

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

A. HANAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Agustus 2024 M
11 Safar 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR ....

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN URUTAN NOMOR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NOMOR RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET
1	*2*	*3*	*4*
1	01/RENJA-MPD/2024	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	
2	02/RENJA-PK/2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	03/RENJA-DINKES/2024	Dinas Kesehatan	
4	04/RENJA-PUPR/2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
5	05/RENJA-BPBD/2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
6	06/RENJA-SATPOL PPWH/2024	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
7	07/RENJA-DINSOS/2024	Dinas Sosial	
8	08/RENJA-DP3AP2KB/2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
9	09/RENJA-DISTANAH/2024	Dinas Pertanahan	
10	10/RENJA-DLH/2024	Dinas Lingkungan Hidup	
11	11/RENJA-DISDUKCAPIL/2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
12	12/RENJA-DPMG/2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
13	13/RENJA-DISHUB/2024	Dinas Perhubungan	
14	14/RENJA-DISKOMINFO/2024	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	
15	15/RENJA-DPMPTSP NAKER/2024	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
16	16/RENJA-DISPORAPAR/2024	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	

NO	NOMOR RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET
1	*2*	*3*	*4*
17	17/RENJA-MAA/2024	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
18	18/RENJA-DISPUSIP/2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
19	19/RENJA-DKPPP/2024	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
20	20/RENJA-DISPERINDAGKOP/2024	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
21	21/RENJA-SETDAKO/2024	Sekretariat Daerah	
22	22/RENJA-SETWAN/2024	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota	
23	23/RENJA-BAPPEDA/2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
24	24/RENJA-BPKD/2024	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
25	25/RENJA-BKPSDM/2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
26	26/RENJA-INSPEKTORAT/2024	Inspektorat	
27	27/RENJA-BANDA SAKTI/2024	Kecamatan Banda Sakti	
28	28/RENJA-BLANG MANGAT/2024	Kecamatan Blang Mangat	
29	29/RENJA-MUARA SATU/2024	Kecamatan Muara Satu	
30	30/RENJA-MUARA DUA/2024	Kecamatan Muara Dua	
31	31/RENJA-KESBANGPOL/2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
32	32/RENJA-MPU/2024	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
33	33/RENJA-BAITUL MAL/2024	Sekretariat Baitul Mal	
34	34/RENJA-DSIPD/2024	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	

PJ. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

A. HANAN

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

Daftar Gambar iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Landasan Hukum I-5

1.3. Maksud dan Tujuan I-8

1.4. Sistematika Penulisan I-9

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II-10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah . II-10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-32

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-34

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II-37

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat II-43

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-44

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional III-44

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah III-46

3.3. Program dan Kegiatan III-48

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH III-85

BAB V PENUTUP IV-87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe II-27

Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKD Kota Lhokseumawe. II-33

Tabel 2.3 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2025 ..... II-38

Tabel 2.4 : Usulan Program dan Kegiatan masyarakat II-43

Tabel 3.1 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Lhokseumawe. III-50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah I-3

Gambar 1.2 : Keterkaitan Dokumen Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. I-3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari Renstra dalam satu tahun anggaran, dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Proses untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Proses penyusunan renja dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Selanjutnya, menganalis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kemudian perumusan tujuan dan sasaran dihasilkan melalui review atas evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Penyusunan Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta penelaahan dari rancangan awal RKPD. Lebih lanjut, perumusan program dan kegiatan

didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan musrenbang dan hasil reses anggota DPRD.

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :

1) Persiapan penyusunan
   - Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025
   - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja 2024, pengendalian kegiatan Tahun 2024, dan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024)
2) Penyusunan rancangan awal
   - Koordinasi dengan Bidang, Pejabat Fungsional yang membidangi Perencanaan.
   - Desk dengan pengampu kegiatan
3) Penyusunan rancangan
   - Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025
   - Masukan dari pelaksana kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe
4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
   - Melaksanakan FGD dengan mengundang : DPRD, OPD terkait, Perguruan Tinggi , dan Pemangku Kepentingan yang terkait
5) Perumusan rancangan akhir
   - Penyempurnaan oleh Tim
   - Diverifikasi oleh Tim Bappeda
6) Penetapan

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 adalah penjabaran dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe 2023–2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2025. Selain itu dokumen lain yang dijadikan perhatian dalam penyusunan adalah RPK Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

Gambar 1.2
Keterkaitan Dokumen Renja dangan Dokumen Perencanaan Lainnya

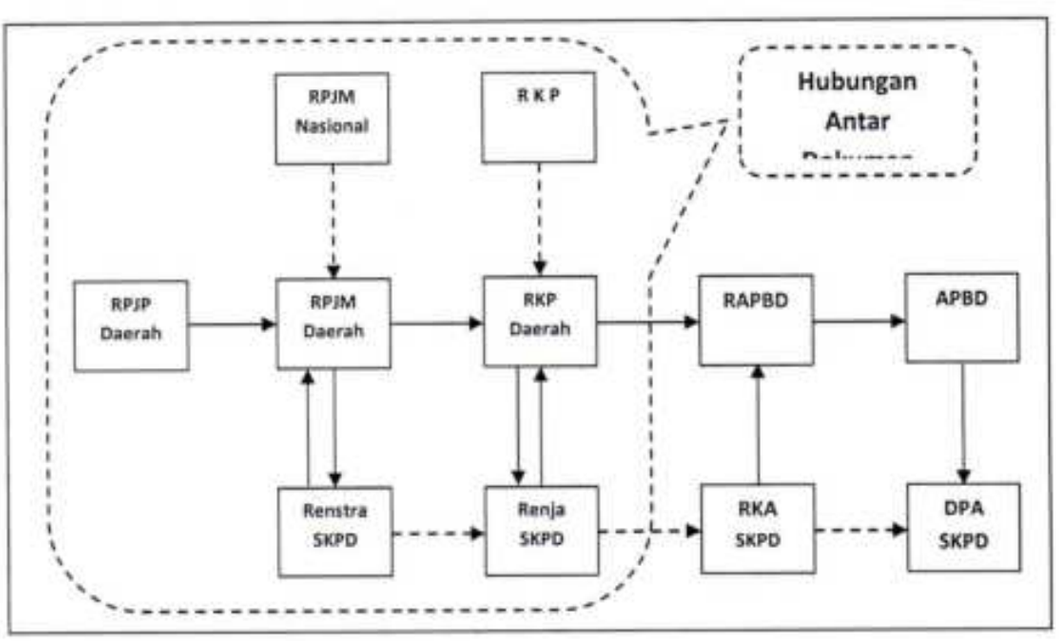

Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPD dan Renstra Perangkat Daerah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan yang ada diatasnya seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD. Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah secara terpadu, partisipasi dan demokratis. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk menyusun Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2025, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan Pemerintah Kota Lhokseumawe mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA–PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Tahun 2025.
2. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk

mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum.

Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 36 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 42 tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi;
17. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe 2025;

18. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 26 Tahun 2024 tentang Analis Standart Belanja Kota Lhokseumawe Tahun anggaran 2024;
19. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 28 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
20. Surat Edaran Walikota Lhokseumawe Nomor 050/4/SE/2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2025 disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan :

1. penyediaan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BPKD tahun 2025.
2. menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional.
3. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah.
4. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
5. menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2023, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe telah melaksanakan 4 program, 13 Kegiatan dan 61 sub kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp.139.880.979.764,- (Seratus tiga puluh Sembilan milyar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.135.964.401.896,- (Seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), sehingga persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah sebesar 97,20% yang termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dapat diuraikan kegiatan beserta capaian indikator kinerjanya dengan kategori sebagai berikut:

A. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

a). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 Kegiatan dengan 2 sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, yaitu :

- ❖ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
  - pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dari rencana anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0%, dengan output jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 5 orang dan tidak ada ASN BPKD yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan untuk Tahun 2023 sehingga sub kegiatan ini tidak memenuhi target kinerja yang telah direncanakan.

- ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
  - pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 % dengan output terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor (taman BPKD) sebanyak 2 unit atau 0%, kegiatan pemeliharaah taman tidak dilaksanakan untuk tahun 2023 dikarenakan taman yang sudah ada masih layak dan tidak perlu untuk dilakukan pemeliharaan.

b). Program Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 3 Kegiatan dengan 6 sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, yaitu :

- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :
  - koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dari rencana anggaran sebesar Rp. 77.672.000,- terealisasi sebesar Rp. 18.615.000,- atau 23,97% dengan output tersedianya nya dokumen Perubahan KUA dan PPAS sebanyak 2 Dokumen, untuk output sub kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan pada tahun 2023 tidak adanya perubahan APBK atau 0%.
  - koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dari rencana anggaran

sebesar Rp. 91.478.400,- terealisasi sebesar Rp. 35.661.800,- atau 39,98% dengan output tersedianya dokumen Qanun Perubahan APBK dan Perwal Penjabaran Perubahan APBK sebanyak 2 Dokumen, untuk output sub kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan pada tahun 2023 tidak adanya perubahan APBK atau 0%.

- ❖ Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
  - koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dari rencana anggaran sebesar Rp. 16.942.660,- terealisasi sebesar Rp. 16.465.800,- atau 97,19 % dengan output tersedianya dokumen kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan sebanyak 35 dokumen dengan realisasi dokumen sebanyak 12 dokumen atau 34,29%.
- ❖ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :
  - Koordinasi, singkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 21.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 % dengan output tersedianya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaiann tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah sebanyak 5 dokumen atau 0%, sub kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan tidak adanya penyelesaian tuntutan kerugian negara dalam bentuk sidang sehingga output kinerja dari perencanaan 5 dokumen tidak dapat dicapai.
  - Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dari rencana

anggaran sebesar Rp. 38.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.729.580,- atau 30,31 % dengan output tersedianya dokumen data sistem dan prosedur dan pelaporan keuangan sebanyak 1 dokumen, untuk output sub kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarena dokumen yang ada masih relevan untuk digunakan dan masih mengacu kepada Permendagri No. 77 Tahun 2020 sehingga ouput yang direncanakan tidak dapat dicapai atau 0%.

- konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 98.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 85.177.800,- atau 86,39% dengan output tersedianya jumlah jenis buku rancangan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebanyak 40 laporan dan output dari sub kegiatan ini dapat dicapai sebanyak 37 laporan atau 92,50%.

c). Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari 1 Kegiatan dengan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

❖ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

- penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 248.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 48.738.258,- atau 19,65% dengan output jumlah jenis penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah sebanyak 5 unit dan yang terealisasi sebanyak 4 unit atau 80%, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu pelaksanaan untuk jasa pembuatan pemetaan peta PBB P2, mengakibatkan belanja tersebut tidak jadi dilaksanakan.

B. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :

a). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 6 Kegiatan dengan 16 Sub Kegiatan, yaitu :

- ❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 20.581.300,- terealisasi sebesar Rp. 16.372.550,- atau 79,55% dengan output tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 2 dokumen atau 100%.
- ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
  - penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 11.136.198.941,- terealisasi sebesar Rp. 10.259.913.187,- atau 92,13% dengan output terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau 100%.
- ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :
  - penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 90.908.200,- terealisasi sebesar Rp.77.281.598,- atau 85,01 % dengan output tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 3 paket atau 100%.
  - penyediaan Bahan Logistik Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.085.000,- atau 18,86% dengan output terpenuhinya makanan dan minuman dalam pelaksanaan rapat – rapat dinas sebanyak 2 paket atau 100%.

- penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp.18.677.100,- terealisasi sebesar Rp.5.949.450,- atau 31,85% dengan output jumlah jenis barang yang dicetak digandakan sebanyak 2 paket atau 100%.
- penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.280.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.280.000,- atau 100% dengan output tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan sebanyak 2 dokumen atau 100%.
- penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 160.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 159.981.779,- atau 99,99% dengan output terselengganya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD keluar daerah 4 laporan atau 100%.
- dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 266.618.700,- terealisasi sebesar Rp. 134.231.690,- atau 50,35% dengan output terkelolanya aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah sebanyak 4 dokumen atau 100%.

❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

- pengadaan kenderaan dinas operasional atau lapangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 38.790.000,- terealisasi sebesar Rp. 38.780.000,- atau 99,97% dengan output jumlah jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dibeli sebanyak 2 unit atau 100%.
- pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari rencana anggaran

sebesar Rp. 396.751.250,- terealisasi sebesar Rp. 202.314.000,- atau 50,99% dengan output jumlah jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dibeli sebanyak 17 unit atau 100%.

- ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :
  - penyediaan Jasa Surat Menyurat dari rencana anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.444.600,- atau 80,56% dengan output Penyediaan Benda Pos dan Paket Pengiriman sebanyak 1 laporan atau 100%.
  - penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari rencana anggaran sebesar Rp. 428.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 313.168.095,- atau 73,08% dengan output terbayarnya rekening Telepon, Listrik dan Astinet/Internet sebanyak 4 laporan atau 100%.
  - penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.007.203.840,- terealisasi sebesar Rp. 907.435.280,- atau 90,09% dengan output jasa pelayanan umum kantor sebanyak 2 laporan atau 100%.
- ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :
  - penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 346.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 263.241.150,- atau 76,08% dengan output terpeliharanya kenderaan dinas / operasional sebanyak 8 unit atau 100%.
  - pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 38.584.044,- atau

70,15 % dengan output terpeliharanya gedung Kantor BPKD sebanyak 2 unit atau 100%.

- pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.270.000,- atau 65,45 % dengan output terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor secara rutin/berkala sebanyak 30 unit atau 100%.

b). Program Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 4 Kegiatan dan 16 sub kegiatan yaitu:

❖ Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

- koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dari rencana anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 87.647.100,- atau 92,26% dengan output tersedianya dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2 Dokumen atau 100%.
- koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dari rencana anggaran sebesar Rp. 260.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 226.995.200,- atau 87,31%dengan output tersedianya dokumen Qanun APBK dan Perwal Penjabaran APBK sebanyak 2 Dokumen atau 100%.
- koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dari rencana anggaran sebesar Rp. 369.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 348.442.200,- atau 94,22% dengan output tersedianya dokumen Pendukung Regulasi Penganggaran Daerah sebanyak 4 Dokumen atau 100%.
- pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dari rencana anggaran sebesar Rp.

745.088.450,- terealisasi sebesar Rp. 611.610.200,- atau 82,09% dengan jumlah orang mengikuti pembinaan penganggaran daerah 44 orang atau 100%.

- ❖ Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :
  - koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 112.442.110,- terealisasi sebesar Rp. 105.599.379,- atau 93,91% dengan output tersedianya dokumen dana perimbangan dan dana transfer lainnya sebanyak 29 Dokumen atau 100%.
  - koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dari rencana anggaran sebesar Rp. 13.677.200,- terealisasi sebesar Rp. 10.544.800,- atau 77,10% dengan output tersedianya dokumen realisasi penerimaan dan pengeluaran kas sebanyak 12 laporan atau 100%.
  - rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dari rencana anggaran sebesar Rp. 123.413.600,- terealisasi sebesar Rp. 118.484.400,- atau 96,01% dengan output tersedianya dokumen Data Transaksi Harian (DTH) dan Rekap Transaksi Harian (RTH) sebanyak 68 dokumen atau 100%.
  - penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 30.521.850,- terealisasi sebesar Rp. 21.071.550,- atau 69,04% dengan output tersedianya dokumen

perbendaharaan daerah terkait pembinaan penatausahaan keuangan SKPD sebanyak 5 dokumen atau 100%.

- ❖ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :
  - koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 27.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 22.872.000,- atau 82,87% dengan output tersedianya jumlah jenis laporan keuangan yang akurat sebanyak 72 laporan atau 100%.
  - rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban dari rencana anggaran sebesar Rp. 28.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.560.250,- atau 61,83% dengan output tersedianya jumlah jenis laporan berita acara Rekonsiliasi keuangan per bulan, triwulan dan semesteran sebanyak 1150 dokumen atau 100%.
  - koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dari rencana anggaran sebesar Rp. 48.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 18.893.200,- atau 39,04% dengan output tersedianya jumlah jenis buku laporan realisasi anggaran triwulan dan semesteran sebanyak 650 laporan atau 100%.
  - koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dari rencana anggaran sebesar Rp. 173.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 162.118.701,- atau 93,28% dengan output tersedianya jumlah jenis buku Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBK dan Buku Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebanyak 4 dokumen atau 100%.

- penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari rencana anggaran sebesar Rp. 57.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 56.987.550,- atau 99,98% dengan output tersedianya dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 1 dokumen atau 100%.
- penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 24.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.457.900,- atau 94,97% dengan output kebijakan dan panduan tehnis operasional Akuntansi Pemerintah Daerah sebanyak 2 dokumen atau 100%.

- pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dari rencana anggaran sebesar Rp. 48.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 45.937.200,- atau 95,70% dengan output jumlah orang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebanyak 140 orang atau 100%.

❖ Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

- analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuang Keuangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 110.752.739.668,- terealisasi sebesar Rp. 109.695.598.767,- atau 99,05 % dengan output

jumlah pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan sebanyak 272 laporan atau 100%.

c). Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 1 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan yaitu :

- ❖ Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 9 Sub Kegiatan yaitu :
  - penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 43.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 42.328.600,- atau 96,97% dengan output tersedianya buku SSH sebanyak 1 dokumen atau 100%.
  - penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 29.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 22.595.100,- atau 76,72% dengan output tersedianya buku RKBMD, RKPBMD dan Perubahannya sebanyak 2 dokumen atau 100%.
  - penatausahaan Barang Milik Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 304.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 298.947.200,- atau 98,08% dengan output tersedianya dokumen asuransi kenderaan, pemeliharaan dan penata usahaan barang milik daerah sebanyak 5 laporan 100%.
  - inventarisasi Barang Milik Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.136.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 119.126.150,- atau 87,53% dengan output tersedianya dokumen inventarisasi /pendataan tanah dibawah jalan dan sensus aset daerah sebanyak 1 laporan atau 100%.
  - pengamanan Barang Milik Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 10.097.341.415,- terealisasi sebesar Rp. 10.028.211.765,- atau 99,32% dengan output tersedianya dokumen sertifikasi aset daerah dan

surat berharga kenderaan bermotor milik daerah sebanyak 10 laporan atau 100%.

- optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 29.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 27.629.000,- atau 93,98% dengan tersedianya dokumen SK Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak sebanyak 1 dokumen atau 100%.
- rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 41.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 41.425.560,- atau 99,58% dengan output jumlah jumlah SKPK yang melakukan Rekonsiliasi laporan BMD dan Rekonsiliasi Aset Lancar sebanyak 34 laporan atau 100%.
- penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 195.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 189.651.900,- atau 97,06% dengan output tersedianya dokumen laporan BMD dan Status BMD sebanyak 1 laporan atau 100%.

d). Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari 1 Kegiatan dengan 10 Sub Kegiatan, yaitu :

❖ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari 11 Sub Kegiatan yaitu :

- penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 23.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.497.131,- atau 91,48% dengan output jumlah laporan penyuluhan dan penyebarluasan informasi perpajakan daerah sebanyak 10 laporan atau 100%.
- pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 174.350.500,- terealisasi

sebesar Rp. 166.620.347,- atau 95,57 %dengan output jumlah wajib pajak dan jumlah laporan objek pajak yang terupdate sebanyak 10 laporan atau 100%.

- pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 82.350.000,- terealisasi sebesar Rp. 69.742.175,- atau 84,69 % dengan output jumlah laporan data objek pajak yang dikelola dan dipelihara dalam basis data pajak daerah sebanyak 10 laporan atau 100%.
- penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari rencana anggaran sebesar Rp. 59.850.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.489.800,- atau 82,69 % dengan output Jumlah Desa NJOP untuk dasar pengenaan PBB serta BPHTB sebanyak 5000 objek pajak atau 100%.
- penetapan Wajib Pajak Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.117.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 108.522.225 atau 92,01 % dengan output dokumen jumlah wajib pajak daerah yang melakukan kewajiban pajak daerah sebanyak 100 dokumen atau 100%.
- penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 26.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.005.945,- atau 33,42% dengan output jumlah dokumen yang tervalidasi dan terverifikasi pelaporan pajak daerah baik yang self assesment maupun official sebanyak 10 dokumen atau 100%.
- penagihan Pajak Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 179.781.300,- atau 65,38 % dengan output jumlah jenis target pajak penerimaan yang direncanakan sebanyak 300 dokumen atau 100%.

- penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.991.000,- atau 33,98 % dengan output jumlah jenis target pajak pajak lebih bayar pajak daerah sebanyak 10 dokumen atau 100%.
- pengendalian, Pemeriksanaan dan Pengawasan Pajak Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 120.000.000 terealisasi sebesar Rp. 76.821.500,- atau 64,02 % dengan output jumlah wajib pajak yang dilakukan monitoring, evaluasi dan pemeriksaan pajak daerah sebanyak 40 dokumen atau 100%.
- pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 233.000.000 terealisasi sebesar Rp. 81.837.050,- atau 35,12% dengan output jumlah laporan administrasi retribusi daerah dan penerimaan retribusi daerah sebanyak 10 laporan atau 100%.

C. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :

a.) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu:

❖ Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

- penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 61.937.940,- terealisasi sebesar Rp. 57.179.800,- atau 86,11% dengan output tersedianya dokumen anggaran kas dan terbitnya SP2D sebanyak 105 dokumen, dengan realisasi dokumen 136 dokumen atau 159,25%.
- pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dari rencana anggaran sebesar Rp. 123.964.640,- terealisasi sebesar Rp. 86.457.200,- atau

69,74% dengan output Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah sebanyak 105 Orang dan yang terealiasi sebanyak 340 Orang atau 323,81%.

D. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya / terpenuhinya atau melebihi target kinerja program.

- Untuk target kinerja program yang telah ditetapkan oleh BPKD pada Tahun Anggaran 2023 pada umumnya telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, walaupun ada beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai target yang dilaksanakan seperti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang tidak dilaksanakan dikarenakan tidak ASN BPKD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun 2023, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dikhususkan untuk pemeliharaan taman yang tidak dilakukan pemeliharaan dikarenakan masih layak untuk digunakan, sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah juga tidak dilaksanakan dikarenakan tidak adanya kasus yang ditangani serta sub kegiatan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah sub kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan dokumen yang ada masih relevan untuk digunakan dan masih mengacu kepada Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat daerah.

- Implikasi terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sangat mempengaruhi terhadap penetapan indikator kinerja utama yang telah di tetapkan oleh BPKD yaitu

WTP dan pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kota Lhokseumawe telah berhasil meraih kembali opini WTP dari BPK RI yang telah dilakukan penilaian/pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Aceh.

F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Secara konsisten melakukan upaya pemenuhan target indikator kinerja sesuai dengan target perencanaan yang telah disusun dengan upaya :

1. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara berkala
2. Melakukan pembinaan dan peningkatan SDM pengelola keuangan, pendapatan dan asset daerah secara kontinyu dan berkelanjutan.
3. Menciptakan inovasi – inovasi baru dalam pengelolaan pendapatan untuk mengoptimalkan pencapaian target pendapatan asli daerah.
4. Mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah secara tertib dan teratur dari administrasi perencanaan, penatausahaan serta pemanfaatan asset daerah.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah seperti tabel 2.1. berikut :

TABEL 2.1
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Kinerja Capaian Program dan Kerangka kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)							Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7		8=7/6			9		10=G+I+8	11=10/E
1.02	KEUANGAN				520.944.689.631		-		139.880.979.764		130.964.401.896		97,20%	>		141.936.014.198	277.900.418.062	52,75%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100%	100%	52.421.608.913	-	-	100%	14.150.169.331	100%	13.480.352.425	100%	95,27%	>	100%	13.573.730.138	25.804.132.559	49,22%
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	28	129.540.000	-	-	2	20.581.300	2	16.372.550	100,00%	79,55%	>	2	17.200.000	33.572.550	28,08%
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	72.240.000	-	-	2	20.581.300	2	16.372.550	100,00%	79,55%	>	2	17.200.000	33.572.550	46,47%
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	4	7.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%		<	-	-	-	0,00%
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	4	7.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%		<	-	-	-	0,00%
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	4	13.400.000	-	-	-	-	-	-	0,00%		<	-	-	-	0,00%
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	4	13.400.000	-	-	-	-	-	-	0,00%		<	-	-	-	0,00%
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	6.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00%		<	-	-	-	0,00%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	48.587.488.662	-	-	100%	11.136.198.941	100%	10.259.913.187	100,00%	92,13%	>	100%	10.558.826.296	20.818.739.483	51,39%
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	320	40.247.488.662	-	-	80	11.136.198.941	80	10.259.913.187	100,00%	92,13%	>	80	10.558.826.296	20.818.739.483	51,73%
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	308	40.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1640	80.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	60.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	72	60.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	32	160.000.000	-	-	0%	-	0%	-	0,00%	0,00%	-	0%	-	-	0,00%
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perwaru Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	8	80.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24	80.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		464.385.801	-	-	0%	15.000.000	0%	-	0,00%	0,00%	<	0%	15.000.000	15.000.000	3,23%
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	4	264.385.801	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	40.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	40.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	40.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%
1.02.01.2.05.06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	60.000.000	-	-	5	15.000.000	-	-	0,00%	0,00%	<	5	15.000.000	15.000.000	25,00%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	2.960.576.000	-	-	100%	810.484.000	100%	394.809.317	100,00%	63,84%	>	100%	413.380.000	808.089.317	27,21%
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	29	60.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Kinerja Capaian Program dan Kerangka kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)							Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)		Perbiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi K/T/K	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7		8=7/6			9		10=5+7+9	11=10/4
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	300.000.000	0	-	4	90.908.200	3	77.281.598	100,00%	85,07%	>	3	70.000.000	147.281.598	49,09%
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	16	60.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	=	-	-	-	0,00%
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	320.000.000	0	-	2	80.000.000	2	13.085.000	100,00%	16,36%	>	2	65.000.000	80.085.000	25,03%
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	60.000.000	0	-	2	18.677.500	2	5.949.450	100,00%	31,85%	>	2	15.000.000	20.949.450	34,92%
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	9.176.000	0	-	2	2.280.000	2	2.280.000	100,00%	100,00%	>	2	2.280.000	4.560.000	47,62%
5 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	40.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	=	-	-	-	0,00%
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	16	680.000.000	0	-	4	160.000.000	4	159.981.779	100,00%	99,99%	>	4	110.000.000	269.981.779	39,70%
5 02 01 2.06 10	Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	80.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	=	-	-	-	0,00%
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	16	1.400.000.000	0	-	4	266.618.700	4	134.231.690	100,00%	50,35%	>	4	151.000.000	285.231.690	20,37%
5 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**unit**	**101,00%**	**1.669.000.000**	-	-	**100%**	**435.541.250**	**100%**	**241.094.000**	**100,00%**	**55,36%**	>	**100%**	**50.000.000**	**291.094.000**	**17,44%**
5 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Penumpang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Penumpang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	7	665.000.000							0,00%	0,00%	=				0,00%
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	400.000.000	0		2	38.790.000	2	38.780.000,00	100,00%	99,97%	>	-		38.780.000	9,70%
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	13	64.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	=	-	-	-	0,00%
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	40.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	=	-	-	-	0,00%
5 02 01 2.07 08	Pengadaan Asrt Tak Berwujud	Jumlah Unit Asrt Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	16	80.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	=	-	-	-	0,00%
5 02 01 2.07 12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	60	600.000.000	0	-	15	196.751.250	13	202.314.000,00	100,00%	90,99%	>	15	90.000.000	292.314.000	42,05%
												Kenaikan/penurunan Kinerja (%)						
												Realisasi Kinerja (%)						
5 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**5.703.618.452**	-	-	**100%**	**1.441.703.840**	**100%**	**1.227.047.575**	**100,00%**	**84,99%**	>	**100%**	**1.501.963.840**	**2.729.011.415**	**47,18%**
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	21.000.000	0	-	1	6.000.000	1	6.444.600	100,00%	80,56%	>	1	7.000.000	13.444.600	64,02%
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.762.000.000	0	-	4	428.500.000	4	313.168.095	100,00%	73,08%	>	4	488.500.000	719.668.095	40,52%
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	60.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	=	-	-	-	0,00%
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	3.940.618.452	-	-	1	1.007.203.840	1	907.435.280	100,00%	90,09%	>	1	1.004.463.840	2.001.899.120	50,80%
												Kenaikan/penurunan Kinerja (%)						
												Realisasi Kinerja (%)						
5 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Unit**	**168**	**748.000.000**	-	-	**42**	**481.000.000**	**40**	**341.091.194**	**95,24%**	**70,91%**	>	**42**	**757.520.000**	**1.108.615.194**	**148,21%**
5 02 01 2.09 02	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	180.000.000	0	-	8	346.000.000	8	263.241.150	100,00%	76,08%	>	8	237.520.000	500.761.150	278,20%
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	400.000.000	0	-	2	55.000.000	2	38.584.044	100,00%	70,15%	>	2	500.000.000	538.584.044	134,65%
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	120	64.000.000	0	-	60	60.000.000	60	99.270.000	100,00%	65,42%	>	60	20.000.000	59.270.000	92,56%
5 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	84.000.000	0	-	2	20.000.000	-	-	0,00%	0,00%	=	2	10.000.000	10.000.000	11,90%
												Kenaikan/penurunan Kinerja (%)						
												Realisasi Kinerja (%)						
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)		82,14%	63,67%			
												PREDIKAT KINERJA (PER PROGRAM)		D	D			
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Penetapan APBD Tepat Waktu**		**Tepat Waktu**	**441.191.674.939**	**0**	-	**WTP**	**113.441.778.518**	**WTP**	**111.885.107.877**	**WTP**	**98,63**	>	**WTP**	**125.510.541.220**	**235.415.652.597**	**53,11%**
5 02 02 2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Dokumen**	**64**	**11.111.468.807**	-	-	**12**	**1.639.038.858**	**12**	**1.328.971.500**	**100,00%**	**81,08%**	>	**12**	**1.480.000.000**	**3.808.971.500**	**27,03%**
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	8	313.119.188	0	-	2	95.000.000	2	87.647.100	100,00%	92,26%	=	2	75.000.000	162.647.100	51,94%
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	8	107.089.250	12	-	2	77.672.000	-	18.615.000	0,00%	23,97%	<	-	75.000.000	93.615.000	30,49%
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	4	195.240.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	=	-	-	-	0,00%
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	4	195.271.868	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	=	-	-	-	0,00%
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	4	195.240.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	=	-	-	-	0,00%
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	4	195.240.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	=	-	-	-	0,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan tahunnya		Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Kinerja Capaian Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)							Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi n/n-1	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7		8=7/6			9		10=6+7+9	11=10/4
5 02 02 2 01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	8	968.000.000	0	-	2	260.000.000	2	226.995.200	100,00%	87,31%	>	2	300.000.000	526.995.200	54,44%
5 02 02 2 01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	8	990.388.189	0	-	2	91.478.400		35.661.800	0,00%	38,98%	<		150.000.000	185.661.800	18,75%
5 02 02 2 01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	16	856.510.089	0	-	4	369.800.000	4	348.442.200	100,00%	94,23%	>	4	340.000.000	688.442.200	80,38%
5 02 02 2 01 10	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Orang	176	6.915.310.000	0	-	44	745.588.450	44	611.610.200	100,00%	82,05%	>	44	740.000.000	1.351.610.200	19,55%
5 02 02 2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Dokumen**	**1393**	**2.337.400.999**	-	-	**244**	**482.900.000**	**252**	**415.902.929**	**103,28%**	**86,11%**	>	**252**	**385.000.000**	**800.802.929**	**54,26%**
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	420	103.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	>			-	0,00%
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	420	511.914.579	0	-	105	61.937.940	336	57.179.800	319,57%	92,32%	>	105	56.000.000	113.179.800	22,11%
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	116	511.914.579	0	-	29	112.482.110	29	105.599.379	100,00%	93,93%	>	29	70.000.000	175.599.379	34,30%
5 02 02 2.02 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	140	75.786.742	0	-	35	18.942.660	12	16.465.800	34,29%	87,19%	>	35	16.000.000	32.465.800	42,84%
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	48	61.179.911	0	-	12	13.677.200	12	10.544.800	100,00%	77,10%	>	12	13.000.000	23.544.800	38,48%
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	272	552.045.231	0	-	68	123.416.600	68	118.984.800	100,00%	96,01%	>	68	100.000.000	218.984.400	39,58%
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	20	136.528.242	0	-	5	30.521.850	5	21.071.550	100,00%	69,04%	>	5	30.000.000	51.071.550	37,41%
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Orang	420	384.531.117	0	-	105	123.984.640	440	86.457.200	523,81%	69,74%	>	105	100.000.000	186.457.200	48,49%
5 02 02 2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Dokumen**	**4.068**	**2.607.980.651**	-	-	**1160**	**567.108.000**	**1.158**	**444.734.181**	**99,31%**	**78,42%**	>	**1.158**	**450.000.000**	**894.734.181**	**34,31%**
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	312	132.404.685	0	-	72	27.900.000	72	22.872.000	100,00%	82,87%	>	75	25.000.000	47.872.000	36,56%
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban	Dokumen	4680	135.989.190	0	-	1150	26.400.000	1.250	17.560.250	100,00%	41,83%	>	1.250	20.000.000	37.560.250	27,62%
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	2620	225.845.815	0	-	650	46.400.000	650	18.893.200	100,00%	39,04%	<	650	40.000.000	58.893.200	26,12%
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	160	441.250.741	0	-	40	98.600.000	37	85.177.800	92,50%	86,39%	>	40	80.000.000	165.177.800	37,45%
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Dokumen	16	786.376.434	0	-	4	171.800.000	4	162.118.701	100,00%	93,28%	>	4	140.000.000	302.118.701	38,42%
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	4	254.968.401	0	-	1	57.000.000	1	56.987.550	100,00%	99,98%	>	1	50.000.000	106.987.550	41,96%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 s/d 2026		Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)							Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7		8=7/6			9		10=6+7+9	11=10/4
x 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	24	186.907.817	0		5	21.900.000			0,00%	0,00%	-	5	20.000.000	20.000.000	18,71%
x 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Pandoman Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Pandoman Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	8	118.432.605	0		2	34.700.000	2	23.457.900	100,00%	99,97%	-	2	20.000.000	43.457.900	36,69%
x 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	4	185.529.574	0		1	38.700.000		11.729.580	0,00%	30,31%	-	1	20.000.000	11.729.580	17,10%
x 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	560	220.681.250	0		140	48.000.000	140	45.937.200	100,00%	95,70%	-	140	85.000.000	80.937.200	36,64%
													Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	97,00	98,00%				
													Prediksi Realisasi	97					
x 02 02 2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan**	**Laporan**	**1.088**	**427.134.825.083**	-	-	**272**	**110.752.739.868**	**272**	**109.695.598.767**	**100,00%**	**99,05%**		**272**	**121.015.545.220**	**230.711.143.987**	**54,03%**
x 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1.088	427.134.825.083	0		272	110.752.739.868	272	109.695.598.767	100,00%	99,05%	-	272	121.015.545.220	230.711.143.987	54,02%
													Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	97	98,00%				
													Prediksi Realisasi	97					
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)		101,51%	98,58%			
												PREDIKAT KINERJA (PER PROGRAM)		BT	BT			
5.02.03.	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**100%**	**25.366.650.679**	**0**		**9**	**10.877.741.415**	**9**	**10.769.915.365**	**9**	**99,01**	**>**	**9**	**3.606.190.800**	**14.376.106.165**	**56,67%**
x 02 03 2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Dokumen**	**36**	**25.366.650.679**	-	-	**9**	**10.877.741.415**	**9**	**10.769.915.365**	**100,00%**	**99,01%**	**>**	**9**	**3.606.190.800**	**14.376.106.165**	**56,67%**
x 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	4	226.374.163							0,00%	0,00%	-				0,00%
x 02 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	4	861.078.398	0	-	1	43.650.000	1	42.928.600	100,00%	98,35%	>	1	80.000.000	82.328.600	22,80%
x 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	8	178.643.598	0	-	2	29.450.000	2	22.595.100	100,00%	76,72%	>	2	25.000.000	47.595.100	26,64%
x 02 03 2.01 05	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Laporan	20	1.080.200.245	0	-	5	309.800.000	5	298.947.200	100,00%	96,50%	>	5	260.000.000	558.947.200	49,89%
x 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (IHI) Barang Milik Daerah	Laporan	4	628.049.002	0	-	1	196.300.000	1	119.126.150	100,00%	87,53%	>	1	80.000.000	199.126.150	31,71%
x 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	40	21.711.651.767	0	-	10	10.097.941.415	10	10.028.211.765	100,00%	99,31%	>	10	3.070.000.000	13.098.211.765	60,33%
x 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangankan, Penyesuhan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangankan, Penyesuhan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	4	159.810.447	0	-	1	29.806.000	1	27.629.000	100,00%	92,69%	>	1	26.190.800	53.819.800	33,68%
x 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	136	692.433.539	0	-	34	41.600.000	34	41.425.650	100,00%	99,58%	>	34	50.000.000	91.425.650	13,20%
x 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	4	328.412.868	0	-	1	195.400.000	1	189.651.900	100,00%	97,06%	>	1	75.000.000	264.651.900	80,59%
													Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	97	98,00%				
													Prediksi Realisasi	97					
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)		100,00%	99,65%			
												PREDIKAT KINERJA (PER PROGRAM)		BT	BT			
5.02.04.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase penerimaan PAD**		**100%**	**5.864.755.299**	**0,00**		**100%**	**1.410.956.500**	**96,17**	**825.046.711**	**96,17%**	**58,76%**	**>**	**100,00**	**1.475.490.000**	**2.300.536.711**	**39,29%**
x 02 04 2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Besaran Penerimaan PAD**	**Miliar**	**281,48**	**5.864.755.299**	-	-	**70,31**	**1.410.956.500**	**67,90**	**825.046.711**	**96,57%**	**58,76%**	**>**	**70,39**	**1.475.490.000**	**2.300.536.711**	**39,29%**
x 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisi Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	10	1.142.829.736	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	2	50.000.000	50.000.000	4,38%
x 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Pemberitahuan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberitahuan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	40	107.753.125	0	-	10	23.500.000	10	21.497.131	100,00%	91,48%	>	10	15.000.000	36.497.131	33,87%
x 02 04 2.01 04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	20	236.393.568	-	-	5	248.000.000	4	48.738.258	80,00%	19,65%	>	5	411.490.000	460.228.258	203,39%
x 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	40	775.822.500	-	-	10	178.350.500	10	164.620.947	100,00%	91,57%	>	10	121.000.000	286.620.947	36,94%
x 02 04 2.01 06	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelayanan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelayanan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	40	366.360.625	0	-	10	82.330.000	10	69.042.175	100,00%	83,86%	>	10	75.000.000	144.342.175	39,51%
x 02 04 2.01 07	Pendaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	20.000	267.227.750	-	-	5.000	59.890.000	5.000	49.489.800	100,00%	82,65%	>	5.000	60.000.000	109.489.800	40,97%
x 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	400	534.455.500	-	-	100	117.950.000	100	108.522.225	100,00%	92,01%	>	100	90.000.000	198.522.225	37,14%
x 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	40	139.303.750	0	-	10	26.950.000	10	9.005.945	100,00%	33,42%	-	10	20.000.000	29.005.945	22,43%
x 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	200.000	775.822.500	0	-	300	275.000.000	300	179.781.300	100,00%	65,38%	>	300	200.000.000	379.781.300	48,95%
x 02 04 2.01 12	Pengelolaan Kebenaran Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	80	271.537.875	0	-	10	50.000.000	10	16.991.000	100,00%	33,98%	-	10	50.000.000	66.991.000	24,67%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Kinerja Capaian Program dan Kelauran kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)							Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)		Perbiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7		8=7/6			9		10=9+7+8	11=10/K
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	300.000	775.823.500	0		40	120.000.000	40	76.821.500	100,00%	64,02%	>	40	154.000.000	230.821.500	29,79%
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	40	271.537.675	0		10	233.000.000	10	83.837.050	100,00%	35,12%	<	10	180.000.000	261.837.050	96,43%
5 02 04 2.01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	4	220.000.000							0,00%	0,00%	<	10	50.000.000	50.000.000	22,73%
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)			58,33%	62,40%		
												PREDIKAT KINERJA (PER PROGRAM)			ST	ST		
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM)			93,58%	75,34%		
												PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)			ST	ST		
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (BIDANG URUSAN) (%)			93,58%	75,34%		
												PREDIKAT KINERJA (BIDANG URUSAN)			ST	ST		
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)			93,58%	75,34%		
												PREDIKAT KINERJA (PER OPD)			ST	ST		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan RPK Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang disusundengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata CaraPerubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RencanaKerja Pemerintah Daerah, dan peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Walikota LhokseumaweNomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, dengan jelas disebutkan tugas Pokok Perangkat Daerah adalah sebagai unsur pendukung tugas walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Oleh karenanya dalam hal kinerja pelayanan yang dimaksudkan adalah kinerja pelayanan Pengelolaan Keuangan daerah, bukanlah kinerja pelayanan yang langsung berhubungan dengan atau kepada masyarakat.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah seperti tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKD Kota Lhokseumawe

NO	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Posisi 30 Juni 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Indikator Kinerja Utama										
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah			WTP	WTP	WTP	WTP	Dalam Proses	WTP	WTP	
	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah										
1.	Persentase pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah			100%	100%	100%	100%	10,18%	100%	100%	
2.	Rata - rata persentase pencapaian program pada masing - masing perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	Dalam Proses	100%	100%	
	Indikator Kinerja Daerah										
1.	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	100%	66,67%	100%	100%	
2.	Penetapan APBD Tepat Waktu			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Dalam Proses	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
3.	Opini BPK terhadap laporan keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	Dalam Proses	WTP	WTP	
4.	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	25,49%	100%	100%	
5.	Persentase Penerimaan PAD			100%	100%	100%	100%	20,33%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Beberapa kendala dalam pelaksanaan tugasdanfungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah keterbatasan sarana prasarana aparatur, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran yang ada. Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Perangkat Daerah dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT :

1. Kekuatan/Potensi *(Strength)*
   - Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
   - Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
   - Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
   - Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Kelemahan (Weaknes)
   - Kualitas sumber daya manusia yang masih belum memadai khususnya dalam hal pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah yang ada di Perangkat Daerah, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Lhokseumawe secara keseluruhan.
   - Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi
3. Kesempatan/Peluang (Oportunity)
   - Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah;
   - Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
   - Adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memungkinkan untuk terciptanya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel, efektif dan efisien dalam hal penggaran,pendapatan dan belanja daerah baik pada tahap penyusunan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pelaporan keuangan ;
4. Tantangan/Ancaman (Treath)
   - Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
   - Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, Isu-isu dimaksud antara lain :

1. Mengoptimal peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat dan pelaku usaha dengan memberikan penyuluhan, himbauan, pembagian brosur dan pemasangan baliho tentang arti pentingnya membayar pajak dan restribusi daerah demi kesinambungan pembangunan di Kota Lhokseumawe
2. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat disajikan secara valid, professional dan tepat waktu.
3. Mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah secara tertib dan teratur dari administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPK

Renja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, sehingga dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Berdasarkan review terhadap rancangan awal RKPK dikaitkan dengan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe berdasarkan analisis kebutuhan, untuk program, kegiatan dan sub kegiatan telah direncanakan dan diusulkan sesuai dengan dokumen Renstra OPD dan rancangan awal RKPK. Mengenai besaran anggaran dan ada beberapa sub kegiatan yang tidak masuk ke dalam hasil analisa kebutuhan dikarenakan kemampuan keuangan daerah yaitu APBK Pemerintah Kota Lhokseumawe yang belum memadai.

Review terhadap rancangan awal RKPK Tahun 2025 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					131.754.213.581					143.135.805.854	
	KEUANGAN					KEUANGAN					
	PROGRAM PERUKJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Lhokseumawe	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100%	13.109.564.866	PROGRAM PERUKJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Lhokseumawe	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100%	17.096.672.934	
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kota Lhokseumawe	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**29.885.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kota Lhokseumawe	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**17.000.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	17.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.350.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.350.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.625.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	0	
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Lhokseumawe	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**10.142.788.487**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Lhokseumawe	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**15.222.909.094**	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Lhokseumawe	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Index	10.077.788.487	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Lhokseumawe	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Index	15.222.909.094	
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	77 Dokumen	15.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	77 Dokumen	0	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	20.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	0	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0	
C	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kota Lhokseumawe	**Jumlah dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**8 Dokumen**	**40.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kota Lhokseumawe	**Jumlah dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**8 Dokumen**	**0**	
12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0	
13	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	20.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	0	
D	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota Lhokseumawe	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**125.712.766**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota Lhokseumawe	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**15.000.000**	
14	Pengelolaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	80.712.766	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	
15	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	
16	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	
17	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0	
18	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Lhokseumawe	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Lhokseumawe	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	15.000.000	
E	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Lhokseumawe	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**742.394.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Lhokseumawe	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**417.280.000**	
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	0	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	75.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	75.000.000	
21	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	0	
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	80.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	65.000.000	
23	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	
24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.394.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.280.000	
25	Penyediaan Bahan/ Material	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan/ Material	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0	
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	170.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	110.000.000	
27	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0	
28	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	350.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	350.000.000	
F	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Lhokseumawe**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**25 unit**	**50.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Lhokseumawe**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**25 unit**	**50.000.000**	
29	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	
30	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	
31	Pengadaan Mebel	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	16.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0	
32	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	
33	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Lhokseumawe	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4 Unit	20.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Lhokseumawe	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4 Unit	0	
34	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	50.000.000	
G	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Lhokseumawe**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**1.445.904.613**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Lhokseumawe**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**1.001.963.840**	
35	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.250.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	
36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	440.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	400.500.000	
37	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	
38	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	980.154.613	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	599.463.840	
H	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Lhokseumawe**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**42 Unit**	**187.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Lhokseumawe**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**42 Unit**	**372.520.000**	
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	237.520.000	
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	
41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	21.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	20.000.000	
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	21.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Kota Lhokseumawe**	**Persentase APBD Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**110.834.128.738**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Kota Lhokseumawe**	**Persentase APBD Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**124.734.132.920**	
I	**Koordinasi dan Penyusunan Renstra Anggaran Daerah**	**Kota Lhokseumawe**	**Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra Anggaran Daerah**	**16 Dokumen**	**2.771.834.223**	**Koordinasi dan Penyusunan Renstra Anggaran Daerah**	**Kota Lhokseumawe**	**Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra Anggaran Daerah**	**16 Dokumen**	**1.550.000.000**	
43	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	81.033.750	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
44	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	74.963.854	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	75.000.000	
45	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	49.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	0	
46	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	40.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	0	
47	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	40.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	0	
48	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	49.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	0	
49	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	242.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	250.000.000	
50	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	242.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	200.000.000	
51	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	206.836.619	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	200.000.000	
52	Pembinaan Penyelenggaran Pengenggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengenggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	44 Orang	1.729.000.000	Pembinaan Penyelenggaran Pengenggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengenggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	44 Orang	750.000.000	
3	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Kota Lhokseumawe**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**348 Dokumen**	**604.122.752**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Kota Lhokseumawe**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**348 Dokumen**	**400.000.000**	
53	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	105 Dokumen	26.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	105 Dokumen	20.000.000	
54	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	105 Dokumen	132.481.048	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	105 Dokumen	50.000.000	
55	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	29 Dokumen	132.481.048	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	29 Dokumen	70.000.000	
56	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	35 Dokumen	19.613.247	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	35 Dokumen	15.000.000	
57	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	15.833.069	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	15.000.000	
58	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	68 Dokumen	142.866.669	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	68 Dokumen	100.000.000	
59	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen	35.332.857	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen	30.000.000	
60	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	105 Orang	99.514.816	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	105 Orang	100.000.000	
4	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Kota Lhokseumawe**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**1.168 Dokumen**	**676.168.763**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Kota Lhokseumawe**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**1.168 Dokumen**	**465.000.000**	
61	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	80 Laporan	34.265.700	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	80 Laporan	25.000.000	
62	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1.160 Dokumen	55.191.880	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1.160 Dokumen	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
63	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	650 Laporan	58.344.300	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	650 Laporan	60.000.000	
64	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40 Laporan	114.141.825	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40 Laporan	80.000.000	
65	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	203.510.475	koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	140.000.000	
66	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	65.984.635	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	30.000.000	
67	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	7 Dokumen	27.667.238	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	7 Dokumen	20.000.000	
68	Penyusunan Kebijakan dan Pandoan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Kebijakan dan Pandoan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	30.908.588	Penyusunan Kebijakan dan Pandoan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Kebijakan dan Pandoan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	20.000.000	
69	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	48.272.963	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	30.000.000	
70	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	140 Orang	57.881.250	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	140 Orang	35.000.000	
I.	**Penanjung Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kota Lhokseumawe**	**Jumlah Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan**	**272 Laporan**	**106.782.000.000**	**Penanjung Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kota Lhokseumawe**	**Jumlah Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan**	**272 Laporan**	**122.319.132.920**	
71	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	272 Laporan	106.782.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	272 Laporan	122.319.132.920	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Kota Lhokseumawe**	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	100%	6.343.735.024	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Kota Lhokseumawe**	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	100%	1.070.000.000	
M	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kota Lhokseumawe**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**9 Dokumen**	**6.343.735.024**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kota Lhokseumawe**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**9 Dokumen**	**1.070.000.000**	
72	Penyusunan Standar Harga	Kota Lhokseumawe	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	57.904.981	Penyusunan Standar Harga	Kota Lhokseumawe	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	0	
73	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	92.361.342	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	40.000.000	
74	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	45.693.278	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	25.000.000	
75	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	5 Laporan	276.307.838	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	5 Laporan	250.000.000	
76	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	160.650.567	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	80.000.000	
77	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	5.408.811.721	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	525.000.000	
78	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	40.878.401	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	25.000.000	
79	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	34 Laporan	177.119.171	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	34 Laporan	50.000.000	
80	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	84.005.725	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	75.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Kota Lhokseumawe**	**Persentase penerimaan PAD**	100%	1.466.667.952	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Kota Lhokseumawe**	**Persentase penerimaan PAD**	100%	2.235.000.000	
N	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Kota Lhokseumawe**	**Besaran Penerimaan PAD**	**70,39 Milyar**	**1.466.667.952**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Kota Lhokseumawe**	**Besaran Penerimaan PAD**	**70,39 Milyar**	**2.235.000.000**	
81	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	315.106.702	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
82	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	27.562.500	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	30.000.000	
83	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	57.881.250	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	1.210.000.000	
84	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	198.450.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	125.000.000	
85	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10 Laporan	93.712.500	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10 Laporan	75.000.000	
86	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Lhokseumawe	Jumlah Objek Pajak yang Diaemaikan NJOP nya	5.000 Objek Pajak	68.355.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Lhokseumawe	Jumlah Objek Pajak yang Diaemaikan NJOP nya	5.000 Objek Pajak	60.000.000	
87	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100 Dokumen	136.710.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100 Dokumen	90.000.000	
88	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 Dokumen	33.075.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 Dokumen	20.000.000	
89	Penagihan Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	50.000 Dokumen	198.450.000	Penagihan Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	50.000 Dokumen	200.000.000	
90	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10 Dokumen	69.457.500	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10 Dokumen	25.000.000	
91	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	50.000 Dokumen	198.450.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	50.000 Dokumen	180.000.000	
92	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	10 Laporan	69.457.500	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	10 Laporan	180.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2021, tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe,maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe untuk perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 tidak melakukan pengumpulan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas sebagai unsur penunjang.

Tabel usulan program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	0	-
2	-	-	-	0	-
3	-	-	-	0	-

Pada forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan dari usulan masyarakat yang ditujukan kepada BPKD selaku Perangkat Daerah maupun usulan pokir. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program / kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Perencanaan pembangunan nasional pada Tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung percapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Tema RKP Tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Dijabarkan dalam 5 agenda pembangunan yaitu :

1. transformasi sosial;
2. transformasi ekonomi;
3. transformasi tata kelola;
4. supremasi hukum, stabilitas;
5. kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi;

Disamping arah dan kebijakan makro tersebut, dalam pelaksanaannya untuk Tahun 2025 RKP (Rencana Kerja Pemerintah) memiliki pedoman 8 (delapan) arah kebijakan prioritas pembangunan nasional yaitu :

1. memperkokoh ideology Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan

gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas;

5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan;
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan tema pembangunan Pemerintah Aceh yang tercantum pada RKPA Tahun 2025 yaitu "**Mengurangi Ketimpangan Wilayah Melalui Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan**". Tema pembangunan tersebut mempunyai makna bahwa pembangunan Aceh Tahun 2025 diharapkan dapat mengurangi ketimpangan wilayah melalui percepatan pembangunan infrastuktur strategis dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara itu, untuk pencapaian tema pembangunan di atas dirumuskan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2025 yang meliputi :

1. memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian;
2. memantapkan kemandirian pangan, energi, air serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja

dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi;

4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset inovasi pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda;
5. memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulani kemiskinan;
6. memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Lhokseumawe agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Pemerintah Aceh tersebut di atas. Maka tema pembangunan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe yaitu : "**Meningkatkan infrastruktur Kota Lhokseumawe berkualitas dengan memperhatikan tata kelola lingkungan hidup yang baik serta peningkatan layanan publik melalui digitalisasi**". Dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 yaitu :

1. Infrastruktur;
2. Lingkungan Hidup;
3. Reformasi Birokrasi;
4. Kesehatan;
5. Pendidikan;
6. Pertumbuhan Ekonomi;
7. Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Kota (RPK) Kota Lhokseumawe 2023–2026 yaitu : tujuan **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** dengan indikator tujuan : ***Indeks Reformasi Birokrasi***, dengan sasaran : **Meningkatnya Kapasitas**

dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan indikator sasaran **Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah.**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Kota (RPK) tersebut ditetapkan sasaran dan indikator sasaran yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokscumawe tahun 2025 yang mengacu pada target yang telah ditetapkan pada review Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokscumawe Tahun 2023-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja (Tahun 2025)
TUJUAN : - Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Katagori/ point	B
	- Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	WTP, WDP, TW, TMP	WTP
	- Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah	Persen	100
	- Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata – rata persentase pencapaian program pada masing – masing perangkat daerah	Persen	100

Adapun Indikator Kinerja Daerah (IKD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 sebagaimana table berikut :

Target Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Renja BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No.	Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator KinerjaPembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2025
	KEUANGAN		
1.	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100
2.	Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP, WDP, TW, TMP	WTP
4.	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100
5.	Persentase Penerimaan PAD	Persen	100

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran Kota Lhokseumawe, pada dasarnya kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai unsur penunjang urusan keuangan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe mempunyai program sebagaimana terlihat pada tabel 3.1.

Untuk Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe merencanakan 4 program, 13 kegiatan dan 66 sub kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp. 145.135.805.854,- (Seratus empat puluh lima milyar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

1) program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan;
2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 4 kegiatan dan 25 sub kegiatan;
3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan 1 kegiatan dan 8 sub kegiatan;
4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan 1 kegiatan dan 12 sub kegiatan.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						**145.133.805.854,00**							**131.934.716.853,00**	
	5	**UNDUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**145.133.805.854,00**							**131.934.716.853,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**145.133.805.854,00**							**131.934.716.853,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**17.096.672.934,00**						-	**13.127.645.133,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	17.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe	-	39.885.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	17.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Biang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		18.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Biang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		1.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		1.750.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		3.350.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		3.350.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		1.625.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	15.222.909.094,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe	-	10.142.788.487,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	15.222.909.094,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		10.077.788.487,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				*77 Dokumen*	0.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		15.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD				400 Dokumen	0.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		20.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		15.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	0.00	Kota Lhoksaumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhoksaumawe		15.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhoksaumawe	-	40.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0.00	Kota Lhoksaumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhoksaumawe		20.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0004	Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	0.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	15.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe	-	123.673.035,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		78.673.035,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Peralatan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berbasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	15.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	417.280.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe	-	742.394.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	0,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	75.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	0,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	60.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.280.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		2.384.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	110.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas, Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		170.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas, Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	150.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas, Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah*	-			25 Unit	50.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe	-	415.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birohrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0.00	Kota Lhoksaumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhoksaumawe		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0.00	Kota Lhoksaumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhoksaumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhoksaumawe		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				4 Unit	0.00	Kota Lhoksaumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhoksaumawe		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	50.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	1.001.963.840,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe	-	1.445.904.613,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		5.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	400.500.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		440.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	589.463.840,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		965.154.613,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			42 Unit	372.520.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih agritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe	-	187.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	237.520.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih agritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		45.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih agritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	20.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		21.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	15.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		21.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Penetapan APBD Tepat Waktu Opini BPK***	-			**Tepat Waktu Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu WTP Opini**	**124.734.132.920,00**						-	**110.385.868.490,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*	-			00 Dokumen	1.550.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe	-	2.846.237.715,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PENANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	75.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		85.085.438,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	75.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		85.085.438,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA (SKPD)														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	0,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	0.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	0.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	0.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	250.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas, Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		243.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	200.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas, Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		265.386.389,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	250.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas, Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		238.178.450,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				44 Orang	750.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		1.729.526.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*	-			464 Dokumen	400.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe	-	604.528.887,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				105 Dokumen	20.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		27.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				105 Dokumen	50.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		139.105.099,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				29 Dokumen	70.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		139.105.099,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				35 Dokumen	15.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		20.593.909,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Pemihungan Pihak Ketiga (PFK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	15.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelidupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		16.624.722,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				68 Dokumen	100.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelidupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		150.010.002,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				5 Dokumen	30.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelidupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		37.009.499,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Pembukuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembekalan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				105 Orang	100.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		104.490.557,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*	-			2075 Dokumen	465.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe	-	705.201.888,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				80 Laporan	25.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		35.979.885,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban				1150 Dokumen	25.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		36.951.396,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				650 Laporan	50.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		61.251.515,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				40 Laporan	80.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		119.848.916,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota				4 Dokumen	140.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		213.685.999,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		69.283.958,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				7 Dokumen	20.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		29.050.599,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	20.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		31.454.017,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		49.686.611,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				140 Orang	35.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		58.808.030,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	-			272 Laporan	122.319.132.920,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Desa/Gampong dalam Lingkup Kota Lhokseumawe	-	106.800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				272 Laporan	122.319.132.920,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Desa/Gampong dalam Lingkup Kota Lhokseumawe		106.800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	-	-			-	**1.070.000.000,00**						-	**6.352.425.941,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	1.070.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe	-	6.352.425.941,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kota Lhoksaumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih agritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhoksaumawe		60.800.230,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Lhoksaumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih agritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhoksaumawe		99.979.409,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	25.000.000,00	Kota Lhoksaumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih agritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhoksaumawe		47.980.042,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Pemanfaatan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				5 Laporan	250.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		280.123.230,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	80.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		188.683.095,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				10 Laporan	525.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		5.370.756.474,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas, Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		42.922.321,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas, Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		185.975.130,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	75.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas, Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		89.206.010,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
4	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase penerimaan PAD***	-			**100 Persen**	**2.235.000.000,00**						-	**1.488.677.287,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Besaran Penerimaan PAD	-			70.39 Milyar	2.235.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha	-	1.468.677.267,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				3 Dokumen	50.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas. Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		259.537.974,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				10 Laporan	20.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas. Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		28.940.625,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				5 Unit	1.219.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas, Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		60.775.313,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				10 Laporan	125.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas, Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		209.372.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basic Data Pajak Daerah				10 Laporan	75.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas, Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		99.396.125,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				5000 Objek Pajak	60.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		71.772.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				100 Dokumen	80.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		143.545.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				10 Dokumen	20.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		34.728.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				300 Dokumen	200.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas, Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		268.372.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				10 Dokumen	35.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		77.930.375,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				40 Dokumen	180.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		268.372.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				10 Laporan	180.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Bunda Sakti, Kota Blang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgun	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih egritas Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		72.930.375,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	J U M L A H							**145.135.805.854,00**							**131.934.715.853,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Walikota Lhokseumawe dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam upaya menyukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2025 telah disusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

Untuk mendukung optimalisasi dan peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta untuk menindak lanjuti permendagri Nomor 90 Tahun 2017 dan penyesuaian Nomenklatur Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang baru sesuai dengan peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, mengakibatkan adanya kegiatan yang perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan perangkat daerah sehingga terjadi perbedaan antara rancangan awal RKPK dengan Hasil Analisis Kebutuhan.

Untuk Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe merencanakan 4 program, 13 kegiatan dan 66 sub kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp. 145.135.805.854,- (Seratus empat puluh lima milyar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

Program, kegiatan dan sub kegiatan serta rincian kebutuhan anggaran untuk tahun 2025 telah diuraikan pada Bab III dalam Tabel. 3.1

BAB V
P E N U T U P

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Renja ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025. Guna menjamin terlaksananya program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah secara terarah, efektif dan efisien, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh bidang kerja di lingkungan Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 secara sinergis dan terintegrasi.

2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap Kepala Bidang dan Sekretaris wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala kepada Kepala Perangkat Daerah.

3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dimungkinkan terjadi perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 bila diperlukan.

4. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetap kan sampai dengan akhir tahun 2025. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

BERITA ACARA
HASIL DESK VERIFIKASI RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **23** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Opproom Bappeda Kota Lhokseumawe, telah diselenggarakan Desk Verifikasi Rancagan Akhir Renja Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Kota Lhokseumawe pada acara pembukaan Desk Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.
2. Pembahasan usulan-usulan melalui aplikasi SIPD Kemendagri.
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Desk terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputussan bersama desk, maka pada :

Hari dan Tanggal	:	Selasa, 23 Juli 2024
Waktu	:	14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Opproom Bappeda Kota Lhokseumawe
Kegiatan	:	Desk Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

MENYEPAKATI

KESATU : Sistematika renja agar disesusikan dengan ketentuan pada pasal 129 Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling sedikit memuat :

1. Pendahuluan:
2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
5. Penutup.

KEDUA : Melakukan penyempurnaan rancangan Renja Tahun 2025 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi :

1. penyempurnaan rancangan Renja sesuai saran dan masukan Tim Verifikasi Renja Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
2. menyempurnakan Rincian Belanja Rancangan Akhir Renja sesuai hasil Pembahasan dengan Tim Verifikasi Ranja Tahun 2025 melalui https://lhokseumawe.sipd.kemendagri.go.id/daerah
3. memastikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 telah sesuai dengan Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe Tahun 2025;

KETIGA : Hasil Kesepakatan Desk Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025 dan Daftar Hadir Peserta Desk sebagaimana tercantum merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

KEEMPAT : Berita Acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025.

Lhokseumawe, 23 Juli 2024

Mewakili Peserta Desk Verifikasi Renja,

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ronny, ST, M.S.M	Perencana pada BAPPEDA Kota Lhokseumawe	
2.	M. Sulaiman, SE	Perencana pada BAPPEDA Kota Lhokseumawe	
3.	Masdalena, SH	Perencana pada BAPPEDA Kota Lhokseumawe	
4.	Zikrullah, S.Kom	Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada BPKD Kota Lhokseumawe	

Mengetahui,
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan,

Nunung Mariani, S.Si
Pembina, IV/a
NIP. 197710162001122004

HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

1.1 Latar Belakang

TEMUAN	PENYEBAB	SARAN PENYEMPURNAAN
- Masih ditemukan peratuaran Gubernur yang tidak relevan,		- Agar dapat disesuaikan

TEMUAN	PENYEBAB	SARAN PENYEMPURNAAN

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

- Point 'f Kebijakan realisasi program/kegiatan yang mencapai target kinerja arah kebijakan untuk optimalisasi pencapaian belum ada narasi dalan renja		- Agar dapat disesuaikan dengan kondisi peraturan saat ini dan sesuai tupoksi masing - masing OPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

TEMUAN	PENYEBAB	SARAN PENYEMPURNAAN
- Pada Bab 3.2 tidak ditemukannya Tabel Indikator Kinerja (IKD) Perangkat Daerah		Agar dapat disesuiakan

Mengetahui,
Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenaga Kerjaan
Bappeda Kota Lhokseumawe

Nunung Mariani, S.Si
Nip. 19771016 200112 2 004

Lhokseumawe, 20 Agustus 2024
Verifikator

M. Sulaiman, SE
Nip. 19820510 200904 1 006

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan

Renja Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengenalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan
		Ada	Tidak Ada		
[(1)]	[(2)]	[(3)]	[(4)]	[(5)]	[(6)]
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan agenda kerja	✓			
2	Pengelolaan data dan informasi.	✓			
3	Analisis gambaran pelayanan perangkat Daerah.	✓			
4	Mengkaji hasil Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan Renstra-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	✓			
5	Penentuan isu-isu penting, penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten/kota.	✓			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota	✓			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	✗			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten/kota				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerahkabupaten/kota dengan usulan Program dan Kegiatan Musrenbang kabupaten/kota.	✓			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
10.c.	mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat Daerah Provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendapat program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai surat edaran Walikota.	✓			
11	Sasaran program dan kegiatan perangkat Daerah Kabupaten/Kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12	Program dan kegiatan antar perangkat Daerah Provinsi dengan perangkat Daerah Lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan Daerah telah dibahas dalam forum perangkat Daerah Kabupaten/Kota	✓			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah disahkan.	✓			

Lhokseumawe, Tanggal Juli 2024

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

MUHAMMAD RIDHWAN, SE, M.Si
Nip. 19820303 200803 1 001

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
JLN. MUHAMMAD MALIKUZZAHIR NO. 145 LHOKSEUMAWE 24351

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKj-IP) TAHUN ANGGARAN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang:
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun Anggaran 2024 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe perlu membentuk tim pelaksana kegiatan dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

12. Peraturan. . . . .

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
13. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14 peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
16. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe tahun 2005-2025;
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nornor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Lembaran Kata Lhokseumawe;
22. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe;
25. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024.

Memutuskan. . . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun Anggaran 2024 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKD Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Januari 2024

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

MUHAMMAD RIDHWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 02 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025 DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) TAHUN ANGGARAN 2024 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025 DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) TAHUN ANGGARAN 2024 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
01	02	03	04
1.	Kepala BPKD	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris BPKD	Ketua	
3.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Koordinator	
4.	Kepala Bidang Anggaran	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Derah	Anggota	
7.	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan	Anggota	
9.	Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan	Anggota	
10.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
11.	2 (Dua) Orang Pelaksana (Non PNS)	Anggota	

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

AHMAD RIDHWAN